

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK DI SEKOLAH BERBASIS PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN SLEMAN, YOGYAKARTA)

THE RULES OF CIVICS EDUCATION AS POLITICAL EDUCATION IN ISLAMIC BASED SCHOOL (CASE STUDY AT PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN SLEMAN, YOGYAKARTA)

Oleh: Mohamad Aunurrohim, Universitas Negeri Yogyakarta, mohamadaunurrohim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami (1) peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah berbasis pesantren, (2) masalah yang dihadapi peran PKn sebagai pendidikan politik (3) solusi yang diterapkan dalam masalah peran PKn sebagai pendidikan politik (4) kekhasan pendidikan politik, di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) yang berada di lingkungan pondok pesantren Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2016. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu kepala madrasah, guru PKn, pengasuh pesantren, pengurus pesantren dan santri yang bersekolah di MASPA. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data induktif. Hasil penelitian dipahami bahwa: 1). Peran PKn sebagai pendidikan politik di MASPA sebagai sosialisasi politik kepada para siswa agar orientasi politik dan budaya politiknya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama dan menekankan bagaimana cara untuk menjadi warga negara yang baik, memiliki budaya partisipan 2). Masalah yang dihadapi MASPA dalam peran PKn sebagai pendidikan politik lebih cenderung pada kurangnya akses informasi yang masuk ke pesantren, ketersediaan buku pelajaran, fasilitas pendukung pelajaran, metode pembelajaran dari guru yang minim, peraturan dari madrasah yang menganjurkan guru supaya tidak membebani siswa, guru pelajaran PKn yang bukan berlatar belakang dari jurusan PKn, dan jam pelajaran yang hanya satu kali jam pelajaran selama satu minggu untuk setiap kelas. 3). Solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam peran PKn sebagai pendidikan politik di MASPA yaitu memaksimalkan sumber belajar, metode yang lebih variatif, merekrut guru baru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan kompetensi yang ditempuh. 4). Ciri khas pendidikan politik yang ada di MASPA yaitu, kebijaksanaan Kiai dalam menerima tamu bakal calon kepala daerah atau bakal calon anggota dewan yang berkunjung di pesantren (sesuai dengan nilai religius dan nilai kebangsaan dalam sila pertama dan ketiga), PKn menjadi media pembelajaran demokrasi pesantren untuk mengajarkan nilai-nilai politik.

Kata Kunci : *Peran PKn sebagai pendidikan politik, Sekolah berbasis pesantren.*

Abstract

The purpose of this study is to understand (1) the role of civic education as political education in Islamic based school, (2) the problems faced by the role of civic education as political education (3) the applicable solutions for the problems of the role of civic education as a political education (4) the special characteristic of political education, in Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) which are under Sunan Pandanaran boarding school Sleman, Yogyakarta. This research employs a qualitative method with phenomenological approach. The study was conducted in February 2016 to October 2016. The subject of the research determined by using purposive sampling, they are the headmaster, Civic education teacher, boarding school caretaker, boarding school administrator, and students who attended MASPA. The research uses observation, interviews, and documentation as the data collection techniques. To gain the data trustworthiness, the researcher employs triangulation techniques. The data analysis uses inductive data analysis techniques. The results of the study shows that: 1). The role of civic education as a political education in MASPA used as political socialization to students so that the political orientation and political culture should be appropriate with what have been taught by religion and emphasize how to be good citizens, have a culture of participant 2). Problems faced by MASPA in the role of civic education as political education is more likely at the lack of access to information coming to the boarding

school, the availability of textbooks, facilities to support learning process, minimal learning methods of teachers, madrasah regulation for teachers not to burden the students, the teacher of civic education that is not from civic education background, and the hours proportion of the lesson that are only one hour lesson for one week for each class. 3). The applicable solutions to overcome the problems in the role of civic education as political education in MASPA are maximizing the learning sources, using more varied methods, recruit new teachers that has accordance in the educational background of the subject. 4). The special characteristic of political education in MASPA are the policy of Kiai in welcoming the prospective head region or board members who visited the boarding school (according to the value of religious and national values in the first and the third principle of Pancasila), civic education as the learning media of democracy in boarding school to teach political values.

Keywords: Role of civic education as political education, Islamic based school.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara para siswa, PKn memberikan bekal bagi siswa untuk bagaimana menjadi warga negara secara baik dan benar. Selain itu, PKn juga merupakan pendidikan politik bagi siswa, seperti yang dikemukakan oleh Nu'man Soemantri bahwa PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2004: 8).

Selain itu Cholisin juga menyebutkan sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004: 11). Pendidikan politik menjadi penting karena lewat pendidikan politik ini diharapkan akan membentuk warga negara yang baik, warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara.

PKn masih dipandang sebelah mata karena belum dianggap penting bagi para siswa, bahkan pemerintah sendiri. PKn di dunia pendidikan Indonesia memang masih dipandang sebelah mata karena bukan merupakan pelajaran yang dijadikan parameter utama suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Terbukti dengan belum dimasukkannya PKn ke dalam mata pelajaran yang ada di dalam Ujian Nasional,

walaupun wacana memasukkan PKn ke dalam mata pelajaran yang di ujian nasional kan sudah lama berkembang, namun sampai sekarang belum juga terwujud.

PKn menjadi wadah untuk memupuk karakter warga negara yang baik. Tidak terkecuali bagi santri yang juga menjadi siswa sekolah atau biasanya disebut madrasah yang berada dibawah naungan lembaga atau yayasan Pesantren. Jika menurut Van Bruinessen, kecil kemungkinan ada demokrasi (demokrasi secara umum) di dalam Pesantren (Martin van Bruinessen, 1995) maka PKn disini memberikan dimensi yang berbeda dalam membawa demokrasi kedalam pesantren, karena dalam pendidikan politik yang ada dalam pesantren terkandung unsur demokrasi pula.

Keberhasilan PKn sebagai pendidikan politik tidak terlepas dari peran seorang guru yang mengajarkan PKn itu sendiri, seorang guru menjadi aktor penting bagi tujuan PKn bagi para siswa, karena guru disini menjadi fasilitator sekaligus menjadi sumber utama bagi sosialisasi politik bagi para siswa. Jika guru tersebut pasif dan tidak memahami dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang sedang terjadi, maka siswa pun akan terseret menjadi seseorang yang pasif dan acuh terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi di sekitarnya.

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut Pesantren) sebagai salah satu pendidikan asli Indonesia, dewasa ini telah berkembang secara pesat, Pesantren menjawab tantangan zaman dengan merekonstruksi sistem pendidikannya sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pendidikan politik santri melalui PKn perlu dilakukan karena Pesantren belakangan ini menjadi salah satu sasaran empuk bagi para

politisi untuk menjangkau massa. Kiai seperti menjadi alat kampanye bagi para politisi untuk membawa santrinya mendukung politisi tersebut. *Mindset* yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa ulama adalah pewaris para nabi seolah-olah menjadi jalan yang memudahkan politisi mendapat konstituen dari kalangan santri, karena budaya budaya santri yang masih memegang “*sami’na wa ato’na*” kepada sang Kiai.

Ada yang menilai bahwa keterlibatan Kiai di dunia politik praktis dapat membawa citra pesantren yang cenderung apatis ke arah pesantren yang dinamis, demokratis dan rasional dan mendorong terciptanya masyarakat partisipatif kritis, di samping sebagai modal membangun kehidupan berbangsa dan berbangsa yang aktif, dinamis dan mandiri. Namun dari sisi perspektif yang lain, keterlibatan Kiai dalam dunia politik praktis dianggap tidak produktif dan membingungkan, dan berakhir menjadi pangkal perpecahan dan konflik sosial dalam skala yang besar, karena telah terjadi polarisasi dan politisasi agama.

PKn sebagai pendidikan politik di pesantren dapat membagi perannya, kepada santri yang berniat menjadi politisi, pesantren melalui Madrasahnyapun dapat membekali dengan etika berpolitik. Sementara santri yang memilih jalur keilmuan politik dapat memahami permainan politik sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para perusak politik.

Sebenarnya sangatlah hebat memadukan pendidikan di pesantren dengan PKn, yang keduanya berisi pendidikan karakter. Jika di dalam ajaran Islam ada idiom *Hubbul wathon minal*

iman (mencintai Negara sebagian dari iman), maka PKn menjadi cara untuk mencintai Negara tersebut.

Pondok pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Yogyakarta, dengan mencapai ribuan santri di dalamnya, sudah semestinya pesantren memberikan pendidikan politik melalui sekolah yang ada di dalamnya sebagai bekal kehidupan santri untuk mengarungi kehidupan sosial sebenarnya.

Melihat dari permasalahan yang telah disampaikan penulis di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas peran PKn dalam sekolah berbasis Pesantren dengan judul “Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik di Sekolah Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta)”.

METODE PENELITIAN .

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah berbasis pesantren, masalah yang dihadapi peran PKn sebagai pendidikan politik, solusi yang diterapkan dalam masalah peran PKn sebagai pendidikan politik, dan kekhasan pendidikan politik, di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta dan pesantren Sunan Pandanaran Sleman, yang

beralamat di jalan Kaliurang km. 12,5 Candi, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Target/Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pertimbangan dan tujuan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber yang karena keadaan, situasi dan posisinya dinilai bisa memberikan pendapat, informasi, dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang penelitian, yaitu guru PKn Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran, kepala Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran, pengurus pesantren Sunan Pandanaran, pengasuh pesantren Sunan Pandanaran dan santri yang bersekolah di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun teknik analisis data yang dilakukan mencakup beberapa langkah yaitu reduksi data, pengategorian, *display data*, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kurang Maksimalnya Peran PKn sebagai Pendidikan Politik di Sekolah Berbasis Pesantren

Peran PKn sebagai pendidikan politik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta sebagai pendidikan formal yang terstruktur, tetapi di sekolah berbasis pesantren ini nilai-nilai islam menjadi dasar untuk pengajaran. Pendidikan politik disini menekankan bagaimana

cara untuk menjadi warga negara yang baik, yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tidak acuh terhadap situasi perpolitikan yang sedang terjadi di negaranya.

Hal ini sudah sesuai dengan peran PKn sebagai pendidikan politik menurut Soedjiarto (dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2005), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta : Preenada Media, halaman 9 mengartikan Peran PKn sebagai pendidikan politik bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis (Cholisin, 2015).

Peran PKn sebagai pendidikan politik memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik, salah satu cara agar tujuan tersebut tercapai adalah melalui sosialisasi politik, yaitu dengan merubah cara pandang politik siswa yang memandang bahwa politik itu kotor menjadi sebenarnya politik itu baik, karena politik itu sejatinya adalah alat untuk mensejahterakan rakyat yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma islam.

Kaitannya dengan sosialisasi politik, sesuai dengan temuan dalam penelitian ini, pelajaran PKn sudah menunjukkan perannya dengan mensosialisasikan cara pandang politik yang sesuai dengan teori dari Alfian yaitu Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak

saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat” (Zamroni, 2007 : 137 dalam Cholisin, 2015).

Secara umum, implementasi peran PKn sebagai pendidikan politik di MASPA sudah berjalan dengan baik, namun jika dikaji lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menghambat peran PKn sebagai pendidikan politik disana, faktor tersebut berasal dari budaya pesantren sendiri. Orientasi pesantren yang lebih mengedepankan pendidikan agama daripada pendidikan umum menjadikan peran PKn sebagai pendidikan politik kurang maksimal.

Temuan tersebut berbanding lurus dengan teori yang diungkapkan oleh Imam Suprayogo yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan yang ada di pesantren sangat variatif, baik terkait dengan sistem yang digunakan, kitab yang dijadikan pegangan, orientasi keilmuan dan tidak terkecuali pandangan Kiainya. Masing-masing Kiai sebagai pengasuh pesantren memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Mereka tidak memiliki pola dan apalagi standar sebagaimana kebijakan pengembangan pendidikan nasional akhir-akhir ini. Jika ada bagian yang harus mengikuti standar adalah lembaga pendidikan formalnya, sekalipun juga tidak sepenuhnya. Misal, tidak mengikuti Ujian Nasional. Selain itu, ada yang melakukan modifikasi kurikulum dari pemerintah, menyesuaikan dengan visi pendidikan pesantren. Misalnya, ketika dulu pemerintah menetapkan komposisi muatan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama, masing-masing antara 70% muatan mata pelajaran umum dan 30% muatan mata pelajaran agama. Ternyata dalam

pelaksanaan tidak demikian, pesantren menyebut mengetrapkan 100% mata pelajaran umum dan juga 100% diberikan mata pelajaran agama (Imam Suprayoga, 2009).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah bahwasanya peran PKn sebagai pendidikan politik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran sudah sesuai dengan teori-teori tentang peran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, yaitu sebagai sosialisasi politik siswa, penanaman karakter warga negara yang baik dan pengembangan nilai-nilai demokrasi. Namun secara mendalam, belum berperan secara maksimal, hal ini diakibatkan karena faktor dari pandangan dari pesantren yang lebih mementingkan ilmu agama daripada ilmu umum, sumber daya manusia serta faktor sarana dan prasarana pendukung pembelajaran PKn.

2. Masalah yang Dihadapi dalam Peran PKn sebagai Pendidikan Politik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peran peran PKn sebagai pendidikan politik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran lebih cenderung pada:

- a. Kurangnya akses informasi yang masuk ke lingkungan pesantren yang mengakibatkan siswa kesulitan untuk mengetahui dunia perpolitikan yang saat ini sedang terjadi dan juga sebagai bahan informasi pelajaran.
- b. Metode pengajaran dari guru yang hanya menerapkan metode ceramah. Hal ini membuat siswa menjadi bosan dengan pelajaran

- PKn dan menjadikan siswa tidak tertarik dengan pelajaran PKn. Sehingga muncul persepsi yang kurang baik dari siswa terhadap politik.
- c. Kurangnya sumber buku pelajaran yang tersedia di madrasah, buku pelajaran sangatlah penting bagi proses pembelajaran di sekolah, karena melalui buku pelajaran siswa mendapat sumber belajar yang bisa dibaca kapan saja. Ketersediaan buku pelajaran PKn di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran belum secara merata didapat, belum semua siswa mendapat buku pelajaran dari sekolah.
 - d. Kurangnya fasilitas pembelajaran seperti LCD dan proyektor guna mendukung berjalannya pembelajaran yang lebih baik
 - e. Peraturan dari madrasah yang menganjurkan guru supaya tidak membebani siswa dengan pekerjaan atau tugas yang berat, karena mengingat para siswa juga setelah dari madrasah masih harus berkegiatan di pesantren
 - f. Guru mata pelajaran PKn yang bukan berasal dari latar belakang jurusan PKn, melainkan dari latar belakang jurusan pendidikan lain, seperti Pendidikan Geografi dan Hukum
 - g. Jam pelajaran yang minim, yaitu hanya 1 (satu) kali jam pelajaran

selama satu minggu untuk setiap kelas. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya efektivitas penyampaian materi dalam pembelajaran. Apalagi di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran antara kelas putra dan kelas putri gedungnya dipisah dan membutuhkan waktu dalam perjalanan saat pergantian jam.

3. Penerapan Solusi atas Masalah yang Dihadapi dalam Peran PKn sebagai Pendidikan Politik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa solusi yang sudah diterapkan di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran untuk mengatasi masalah dalam peran PKn sebagai pendidikan politik, solusi tersebut berupa kebijakan sekolah dan juga kebijakan dari guru ketika di kelas, adapun solusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merubah metode pengajaran dari metode ceramah dengan metode tanya jawab, baik itu tanya jawab hal-hal yang menyangkut secara langsung tentang pelajaran yang sedang dipelajari ataupun tentang kehidupan politik yang ada di Indonesia. Kreatifitas guru PKn harus ditingkatkan, karena karakteristik PKn yang strategis, luas dan kompleks. Hal ini mengingat konsekuensi dari PKn itu sendiri yang memiliki misi sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan HAM, pendidikan karakter bahkan sebagai pendidikan anti korupsi.

- b. Pemberian lebih banyak informasi kepada siswa tentang kondisi Indonesia yang sedang terjadi saat-saat ini. Untuk menyikapi kurangnya buku pelajaran yang tersedia,
- c. Memberikan *handout* kepada seluruh siswa untuk menjadi bahan bacaan sumber belajar di akhir pertemuan.
- d. Melakukan perekrutan guru baru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh.

Masalah-masalah yang dihadapi di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran memang sudah diberikan solusi, namun solusi tersebut masih belum mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dan masih terdapat kekurangan dari solusi- solusi tersebut. Untuk memkasimalkan peran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah berbasis pesantren, dalam hal ini yaitu di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran dapat dilakukan solusi sebagai berikut:

- a. Penambahan bahan sumber belajar, seperti buku, atau media cetak untuk akses informasi bagi para siswa
- b. Perbaikan dan pengembangan metode pembelajaran dari guru PKn agar siswa tidak mudah bosan dalam mempelajari PKn. Pengembangan metode pembelajaran ini dapat menggunakan metode pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, seperti:

- 1) Metode pembelajaran berbasis masalah

Metode pembelajaran berbasis masalah adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008: 214).

- 2) Metode pembelajaran Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.

- 3) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. keputusan tertentu secara bersama-sama.

Terdapat jenis-jenis diskusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain:

- a) Diskusi kelas
- b) Diskusi kelompok kecil
- c) Symposium
- d) Diskusi Panel

- 4) Metode Simulasi

Simulasi berasal dari kata *simulate* yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu.

Simulasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a) Sosiodrama
 - b) Psikodrama
 - c) *Role Play* (Wina Sanjaya, 2013:147-162)
- 5) Metode Pembelajaran Sosiodrama
- Metode sosiodrama (bermain peran) adalah mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial antar manusia (Roestiyah N. K, 2011: 90).

Penambahan jam pelajaran dari yang semula hanya satu jam pelajaran menjadi tiga jam pelajaran seperti yang telah tertera di kurikulum dari pemerintah untuk mata pelajaran PKn.

4. Peran Sentral Kiai dalam Pendidikan Politik di Sekolah Berbasis Pesantren

Ciri khas pendidikan politik yang ada di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebijaksanaan Kiai dalam menyikapi dinamika perpolitikan yang terjadi ketika ada bakal calon kepala daerah atau bakal calon anggota dewan baik itu daerah ataupun nasional yang ingin berkunjung tetap diterima dan diperlakukan sebagai tamu secara layak dan diberikan kesempatan untuk berbicara, namun Kiai tidak mengharuskan santri-santrinya untuk memilih dari salah satu bakal calon tersebut, melainkan membebaskan santri-santrinya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Secara formal memang belum diterapkan pendidikan politik di pesantren Sunan Pandanaran, namun melalui madrasah sebagai perpanjangan tangannya, pendidikan politik diberikan melalui pelajaran PKn. Pelajaran PKn ini memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para santri atau siswa bagaimana seharusnya berpolitik, bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik, yang mengetahui dinamika perpolitikan yang sedang terjadi dan tidak acuh terhadap dinamika tersebut. Karena sejatinya inti dari materi PKn juga merupakan salah satu ajaran dari agama islam itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Suprayogo bahwasanya dengan perpaduan antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum diharapkan para santri berhasil mendalami ilmu yang bersumber dari al Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab lainnya, tetapi sekaligus dengan pendidikan dan ijazah SMP dan SMU yang juga diperoleh dari pesantren, para alumninya memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah (Imam Suprayogo, 2009).

Budaya pesantren yang lebih condong patuh kepada Kiai, usatadz dan peraturan memang sedikit menghambat bagaimana jalannya pendidikan politik yang bersifat demokratis. Namun seiring berjalannya waktu, demokratisasi di pesantren belakangan ini sudah mulai terlihat walaupun memang belum seperti demokrasi yang diketahui oleh masyarakat umum di kelas-kelas pembelajaran formal.

Disisi lain, ketaatan santri kepada Kiainya tidak serta merta menjadikan santri sebagai amunisi dalam dunia perpolitikan, karena sifat asli ulama atau Kiai biasanya menjaga jarak antara kepentingan ummat dan kepentingan

politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Yahya, di pesantren, patron-klin antara Kiai-santri didasarkan pada pendekatan tasawwuf, di mana Kiai adalah seorang mursyid yang harus ditaati oleh santrinya. Relasi ini tidak serta merta diterapkan dalam pola hubungan politik yang fiqh sentris, di mana pilihan seorang Kiai dalam berpolitik harus diikuti secara mutlak oleh para Kiai atau santri yang ada dalam bimbingannya (Imam Yahya, 2014: 203).

Di sinilah PKn sebagai pendidikan politik menunjukkan perannya. PKn sebagai pendidikan politik di pesantren dapat membagi perannya, kepada santri yang berniat menjadi politisi, pesantren melalui Madrasahnyapun dapat membekali dengan etika berpolitik. Sementara santri yang memilih jalur keilmuan politik dapat memahami permainan politik sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para perusak politik. PKn memberikan bekal bagi para santri untuk mengarungi kehidupan perpolitikan agar mereka tidak terjebak dalam lembah hitam perpolitikan yang terjadi.

Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Suprayogo, yaitu, *Ulil Albab* berarti orang yang memiliki hati yang lembut, *Ulin Nuha* berarti orang yang memiliki otak yang cerdas, *Ulil Abshor* berarti orang yang memiliki pandangan dan telinga yang tajam. Dari sini, jika kita dapat memahaminya dengan seksama, diiringi dengan niat berjihad di jalan Allah, maka kita akan mampu menjadi orang yang ideal. Orang yang dapat mengimbangi antara duniawi dan ukhrowi serta umum dan agamanya (Imam Suprayogo, 2009).

Pondok pesantren dan sekolah berbasis pesantren memang dua lembaga yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal pendidikan politik, dimana pemegang kekuasaan lembaga, bisa saja itu Kiai atau ketua yayasan mempunyai peran yang sangat sentral dalam penentuan kebijakan dan arah pendidikan politik bagi para santrinya. PKn memberikan orientasi politik bagi para siswa di mana materi dalam PKn merupakan cerminan dari ajaran-ajaran politik dari sang Kiai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Peran PKn sebagai pendidikan politik di MASPA menekankan cara untuk menjadi warga negara yang baik, yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tidak acuh terhadap situasi perpolitikan yang sedang terjadi di negaranya. Menjadi warga negara yang baik ini melalui sosialisasi politik, yaitu dengan merubah cara pandang politik siswa yang memandang bahwa politik itu kotor menjadi sebenarnya politik itu baik, karena politik itu sejatinya adalah alat untuk mensejahterakan rakyat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma islam. PKn menjadi wadah untuk para santri bagaimana mencintai negaranya, karena mencintai negara merupakan salah satu cara untuk mencintai Tuhan.

- b. Masalah yang dihadapi MASPA dalam peran PKn sebagai pendidikan politik antara lain yaitu: kurangnya akses informasi yang masuk ke lingkungan pesantren, kurangnya ketersediaan buku pelajaran, kurangnya fasilitas pendukung pelajaran seperti LCD dan proyektor, metode pengajaran dari guru yang hanya menerapkan metode ceramah, peraturan dari madrasah yang menganjurkan guru supaya tidak membebani siswa dengan pekerjaan atau tugas yang berat, guru pelajaran PKn yang bukan berlatar belakang dari jurusan PKn, dan jam pelajaran yang hanya satu kali jam pelajaran selama satu minggu untuk setiap kelas.
- c. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam peran PKn sebagai pendidikan politik di MASPA antara lain: merubah metode pengajaran dari metode ceramah dengan metode tanya jawab, pemberian lebih banyak informasi kepada siswa tentang kondisi Indonesia yang sedang terjadi saat-saat ini, memberikan *handout* kepada seluruh siswa untuk menjadi bahan bacaan sumber belajar di akhir pertemuan, melakukan perekrutan guru baru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh serta memberikan metode pembelajaran yang variatif kepada siswa agar siswa tidak mudah bosan.
- d. Ciri khas pendidikan politik yang ada di MASPA yaitu Kiai atau ketua

yayasan mempunyai peran yang sangat sentral dalam penentuan kebijakan dan arah pendidikan politik bagi para santrinya. PKn memberikan orientasi politik bagi para santri yang dikombinasikan dengan ajaran-ajaran politik dari Kiai. Kebijakan Kiai dalam menerima tamu bakal calon kepala daerah atau bakal calon anggota dewan yang berkunjung di pesantren, PKn menjadi perpanjangan tangan pesantren untuk mengajarkan nilai-nilai politik yang sebenarnya merupakan salah satu ajaran islam.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan diatas berikut beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, saran tersebut, yaitu:

- a. Saran untuk Guru PKn
 - 1) Memberikan lebih banyak sumber belajar baik yang berupa berita-berita ataupun bahan belajar yang lain
 - 2) Menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, agar siswa tidak mudah bosan dan tertarik kepada pelajaran PKn, khususnya tentang pendidikan politik
 - 3) Lebih banyak merangsang pemikiran siswa untuk lebih memahami politik, agar mereka tidak mudah
 - 4) dikelabui dan terjebak di lingkaran politik yang kotor.
- b. Saran untuk Madrasah

- 1) Memberikan lebih banyak fasilitas buku pelajaran untuk bahan belajar siswa
 - 2) Menempatkan guru pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya
 - 3) Menambah jam mata pelajaran PKn sesuai dengan kurikulum yang baru
- c. Saran untuk Pesantren
- 1) Lebih mnegajarkan kepada santri untuk senantiasa mencintai negaranya
 - 2) Memberikan sedikit porsi untuk pendidikan politik melalui pengajian kitab yang disertai dengan pembahasan masalah kebangsaan yang sedsang terjadi.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung: ALFABETA.

Suprayogo, Imam. 2009. *Kyai dan Pondok Pesantren*. Diakses pada hari Rabu, 23 November 2016 pukul 21.17 dari http://www.imamsuprayogo.com/viewd_artikel.php?pg=332.

Van, Bruinessen Martin. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi Islam di Indonesia (Terjemahan)*. Jakarta: Mizan.

Yahya, Imam. 2014. Dermokrasi Pesantren: Menebar Format Politik yang Damai. *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 6 UIN Walisongo. Semarang. 187-205.

DAFTAR PUSTAKA

Cholisin, 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: FIS UNY.

_____, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Paradigma, Multidimensional, Budaya Kewarganegaraan dan Prinsip Pembelajaran) Referensi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education/ Citizenship Education)*. Yogyakarta: FIS UNY.

Roestiyah N. K. 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2013. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik di Sekolah Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta)

Nama : Mohamad AUnurrohim

NIM : 11401244031

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 18 Januari 2017

Reviewer



Cholisin, M.Si.
NIP. 19550801 198503 1 002

Pembimbing



Dr. Nasiwan, M.Si.
NIP. 19650417 200212 1 001